

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT
KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA,
KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

¹Fahran Al-Fajar, ¹Trisna Insan Noor, ²Dede Sudradjat

¹Program Studi Agribisnis

²Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Pertanian, Unpad.

Email: (fahran14@gmail.com), (trisna.insan.noor@unpad.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan terhadap perubahan sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi sawah di Kelurahan Kersanagara dalam satu bulan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara menggunakan kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 45 orang petani padi sawah yang ditentukan dengan metode *Simpl Random Sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan analisis statistik deskriptif guna mengetahui kesejahteraan menurut 11 indikator kesejahteraan SUSENAS oleh BPS (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah alih fungsi lahan kesejahteraan rumah tangga petani meningkat 0.72% dan termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi.

Kata kunci: dampak, alih fungsi lahan, tingkat kesejahteraan, petani padi sawah

PENDAHULUAN

Sektor pertanian selama ini hanya dihargai karena kemampuannya dalam menghasilkan bahan pangan, serat dan papan, sedangkan fungsi lainnya seperti pada bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan belum banyak dikenal atau masih diabaikan. Multifungsi tersebut berupa fungsi lingkungan, pemelihara tradisi, budaya, dan kehidupan pedesaan, penyedia lapangan pekerjaan, serta basis bagi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi (Agus dan Husen, 2005).

Perlu adanya kebijakan agar multifungsi pertanian tetap dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan yang dimaksud yaitu berupa pelestarian lahan yang merupakan unsur utama dalam kegiatan pertanian, seperti adanya Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang disusun pada 11 Juni 2005 ataupun kebijakan yang tercantum dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang merupakan sistem

dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan perlindungan agrarian yaitu Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 paragraf 7 Pasal 42 ayat 2, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Lahan pertanian pangan ini hanya meliputi area seluas 492 hektar, tersebar di empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan adanya perubahan penggunaan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tasikmalaya baik yang berasal dari lahan pertanian, pemukiman, bandara, hutan, dan danau (Tabel 1.).

Tabel 1. Luas Penyimpangan Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Luas Penyimpangan	
			Ha	%
1	Cihideung	530,02	7,15	0,04
2	Cipedes	810,01	168,56	0,98
3	Tawang	533,03	111,20	0,65
4	Indihiang	3.010,03	319,74	1,86
5	Cibeureum	2.941,03	177,67	1,03
6	Tamansari	2.852,02	333,37	1,94
7	Kawalu	4.112,04	169,98	0,99
8	Mangkubumi	2.368,02	297,37	1,73
Kota Tasikmalaya		17.156,20	1.585,04	9,24

Sumber : Restina (2009)

Kecamatan Cibeureum merupakan daerah yang menduduki peringkat pertama dalam waktu terbaru untuk alih fungsi lahan pertanian, yaitu seluas 5 ha pada tahun 2012-2016 (Tabel 2.). Pengurangan ini, menyebabkan penurunan rata-rata jumlah produksi padi sawah, khususnya di Kecamatan Cibeureum yaitu mencapai 1.222 ton pada tahun 2011-2015 (BPS Kota Tasikmalaya dalam Angka 2012-2016). Tidak semua kelurahan di empat kecamatan yang merupakan kawasan perlindungan pangan di Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, untuk Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu semua kelurahannya termasuk ke dalam LP2B.

Dilihat dari Tabel 3., Kecamatan Cibeureum memiliki potensi untuk luas LP2B terbesar yaitu seluas 763,5 ha yang tersebar di sembilan kelurahan. Banyaknya lahan sawah yang dilindungi di Kecamatan Cibeureum disebabkan oleh adanya lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis yang luas, sehingga sangat berpotensi dalam pengembangan budidaya pangan secara berkelanjutan. Namun tingkat alih fungsi lahan di Kelurahan Kersanagara juga cukup tinggi. Alih fungsi di daerah tersebut disebabkan oleh banyaknya pembangunan perumahan, industri, serta merupakan daerah yang akan dijadikan sebagai kawasan pendidikan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016

Kecamatan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	Luas
					Pengurangan Lahan (Ha)
Kawalu	1.244	1.244	1.244	1.244	-
Tamansari	802	802	802	798	4
Cibeureum	763,5	763,5	763,5	758,5	5
Purbaratu	499	499	499	499	5
Tawang	89	87	87	87	4
Cihideung	74	73	72	70	6
Mangkubumi	1.134	1.134	1.134	1.132	2
Indihiang	419	419	418	418	1
Bungursari	693	693	693	693	-
Cipedes	258	255	254	239	28
Jumlah	5.999	5.993	5.990	5.962	53

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya 2017

Petani yang mengalami konversi lahan akan merasakan dampak yang terjadi mengenai keberlangsungan dalam kegiatan usahatannya. Dampak lainnya yang akan dirasakan yaitu mengenai kondisi sosial dan ekonominya, baik itu dari segi pendidikan, kelembagaan, mobilisasi, pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat konsumsi pangan, serta akan

berpengaruh terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Tabel 3. Luas Lahan Sawah LP2B di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya

No.	Kelurahan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Total (Ha)
1	Setiaratu	77,5	763,5
2	Setiajaya	30,5	
3	Setianagara	50	
4	Ciherang	95	
5	Ciakar	109	
6	Awipari	70	
7	Margabakti	92,5	
8	Kotabaru	94	
9	Kersanagara	145	

Sumber : Kecamatan Cibeureum dalam Angka Tahun 2016

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT
KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA,
KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
FAHRAN AL-FAJAR, TRISNA INSAN NOOR, DEDE SUDRADJAT**

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis metode survei. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian untuk mengangkat fakta, variabel, ataupun fenomena-fenomena kemudian ditampilkan apa adanya pada waktu sekarang (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan menafsirkan data secara sistematis sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan teknik wawancara terstruktur kepada responden (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam penentuan tempat penelitian dan *Simple Random Sampling* dalam menentukan responden di lapangan. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya yaitu sebanyak 45 responden.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung terhadap responden. Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait dan sumber pustaka, seperti buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis struktur pendapatan dan pengeluaran, serta analisis tingkat kesejahteraan petani berdasarkan indikator SUSENAS (2016) yang terdiri dari variabel kependudukan, ketenagakerjaan, pendapatan, pengeluaran, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kondisi dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam memasukan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi, rasa aman, dan kehidupan beragama. Analisis kesejahteraan tersebut menggunakan teknik statistik deskriptif dan skoring dalam pengolahan datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kersanagara berada di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas daratan darat $\pm 18,40$ Ha, pemukiman ± 195 Ha, dan tanah sawah ± 119 Ha. Batas wilayah Kelurahan Kersanagara sebelah Barat berbatasan dengan

Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari.

Kelurahan Kersanagara memiliki 11 kampung dan RW serta 41 RT dengan jumlah penduduk 8.636 orang. Selain itu, memiliki kepadatan penduduk 22 per km dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.610 KK.

Keadaan industri di Kelurahan Kersanagara cukup beragam dan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Jenis industri tersebut yaitu industri konveksi, bordir, kelom, mebeulair, penggilingan padi, pengolahan/ penggergajian kayu, makanan olahan dan lain sebagainya yang merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Kondisi pertanian di Kelurahan Kersanagara cukup beragam, seperti usahatani sayuran, buah-buahan, palawija dan padi sawah. Sistem pola tanam untuk padi sawah mulai dikombinasikan dengan komoditas palawija pada tahun 2012 dengan maksud untuk menjaga kondisi unsur hara tanah dan meningkatkan produktifitas padi.

Perkembangan harga gabah kering pertahunnya semakin meningkat dari bulan Januari hingga Desember. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp 4.600 hingga Rp 6.000 per kg.

Luas lahan pertanian di Kelurahan Kersanagara dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal tersebut karena banyaknya kegiatan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, seperti pembangunan jalan, perumahan, pabrik, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena ada beberapa faktor penarik dan pendorong baik dari pihak petani maupun pihak luar, seperti kondisi ekonomi petani yang belum menentu serta adanya peningkatan harga lahan sawah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terjadi pada tahun 2008-2017 harga lahan sawah meningkat dari Rp 4.000.000 hingga Rp 20.000.000 per tumbak. Hal tersebut dapat memicu dan mendorong petani untuk melakukan alih fungsi lahan disaat kondisi ekonominya sedang bermasalah.

Karakteristik responden dalam penelitian ini sebagian besar termasuk kedalam kategori usia produktif (15-64 tahun), lulusan Sekolah Dasar (SD), memiliki pengalaman usahatani 17-30 tahun dengan sumber pengetahuan yang

petani dapatkan secara turun temurun, memiliki 0-3 orang tanggungan keluarga, dan termasuk kedalam petani dengan kepemilikan luas lahan sempit (< 0,5 ha).

Analisis tingkat kesejahteraan menurut SUSENAS (2016) digunakan dalam

menentukan tingkat kesejahteraan dan tingkat kebahagiaan petani padi sawah di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeuurem, Kota Tasikmalaya. Analisis tersebut terdiri dari 11 indikator yang meliputi bidang sosial dan ekonomi (Tabel 4.)

Tabel 4. Indikator Keluarga Sejahtera Menurut SUSENAS Tahun 2016

Indikator	Kriteria	Bobot	Skor
Kependudukan	Status sebagai kepala keluarga : Suami istri (3)/ duda (2)/ janda (1)	4%	- Baik (Skor 10-12) (3) - Cukup (Skor 7-9) (2) - Kurang (Skor 4-6) (1)
	Jumlah anggota keluarga yang ikut tinggal : ≤ 4 orang (3)/ 5 orang (2) ≥ 6 orang (1)		
	Total tanggungan dalam keluarga : ≤ 4 orang (3)/ 5 orang (2) ≥ 6 orang (1)		
	Jumlah orang yang ikut tinggal : ≤ 1 orang (3)/ 2 orang (2)/ ≥ 3 orang (1)		
Ketenagakerjaan	Jumlah orang yang bekerja dalam keluarga : ≥ 3 orang (3)/ 2 orang (2)/ 1 orang (1)	4%	- Baik (Skor 13-15) (3) - Cukup (Skor 9-12) (2) - Kurang (Skor 5-8) (1)
	Jumlah jam dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan : > 35 jam (3)/ 30-35 jam (2)/ < 30 jam (1)		
	Pekerjaan tambahan : Ada (3)/ sedang mencari (2)/ tidak ada (1)		
	Jenis pekerjaan tambahan : Wiraswasta (3)/ buruh (2)/ tidak ada (1)		
	Waktu dalam melakukan pekerjaan tambahan : Sepanjang tahun (3)/ setelah musim garap (2)/ tidak tentu (1)		
Pendapatan rumah tangga petani	Kriteria kemiskinan rumah tangga petani menurut BPS (2009) : - Kategori tidak miskin (pendapatan per kapita per bulan ≥ Rp 600.000,00) - Kategori miskin (pendapatan per kapita per bulan < Rp 600.000,00)	25%	- Tidak miskin (2) - Miskin (1)
Pengeluaran rumah tangga petani	Kriteria kemiskinan rumah tangga petani berdasarkan BPS (2017) : - Tidak miskin (pengeluaran per kapita per tahun > Rp 4.789.000,00) - Hampir miskin (pengeluaran per kapita per tahun Rp 2.993.125,00 – Rp 4.789.000,00) - Miskin (pengeluaran per kapita per tahun Rp 1.795.875,00 – Rp 2.993.125,00) - Paling miskin (pengeluaran per kapita per tahun < Rp 1.795.875,00)	16%	- Tidak miskin (4) - Hampir miskin (3) - Miskin (2) - Paling miskin (1)
Keadaan tempat tinggal	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati : Milik pribadi (6)/ kontrak (5)/ sewa (4)/ bebas sewa milik orang lain (3)/ bebas sewa milik orang tua/ saudara (2)/ dinas	13%	- Permanen (Skor 20-26) (3) - Semi permanen
	Status tempat tinggal : Hak milik (3)/ Hak guna bangunan (2)/ Hak pakai (1)		
	Jenis atap terluas : Beton (6)/ genteng (5)/ sirap (4)/		

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
FAHRAN AL-FAJAR, TRISNA INSAN NOOR, DEDE SUDRADJAT**

Indikator	Kriteria	Bobot	Skor
	seng (3)/ asbes (2)/ ijuk (1)		en (Skor 13-19) (2) - Tidak permanen (Skor 6-12) (1)
	Jenis dinding terluas : Tembok (3)/ kayu (2)/ bambu (1)		
	Jenis lantai : Marmer/ keramik/ porselin (5)/ tegel/ ubin (4)/ semen (3)/ kayu/ bambu (2)/ tanah (1)		
	Luas lantai : > 100 m ² (3)/ 50-100 m ² (2)/ < 50 m ² (1)		
Fasilitas tempat tinggal	Sumber air minum : Air kemasan bermerek (11)/ air isi ulang (10)/ leding meteran (9)/ leding eceran (8)/ sumur bor/ pompa (7)/ sumur terlindungi (6)/ sumur tidak terlindungi (5)/ mata air terlindungi (4)/ mata air tidak terlindungi (3)/ air sungai (2)/ air hujan (1)	4%	- Lengkap (Skor 38-52) (3) - Cukup lengkap (Skor 24-37) (2) - Kurang lengkap (Skor 10-23) (1)
	Penggunaan fasilitas air minum : Sendiri (4)/ bersama (3)/ umum (2)/ tidak ada (1)		
	Cara memperoleh air minum : Membeli (3)/ langganan (2)/ tidak membeli (1)		
	Sumber air untuk mandi/ mencuci : leding meteran (9)/ leding eceran (8)/ sumur bor/ pompa (7)/ sumur terlindungi (6)/ sumur tidak terlindungi (5)/ mata air terlindungi (4)/ mata air tidak terlindungi (3)/ air sungai (2)/ air hujan (1)		
	Cara memperoleh air untuk mandi/ mencuci : Membeli (3)/ langganan (2)/ tidak membeli (1)		
	WC : Sendiri (4)/ bersama (3)/ umum (2)/ tidak ada (1)		
	Sumber penerangan : Listrik/ PLN (4)/ listrik non PLN (3)/ petromak (2)/ obor (1)		
	Daya listrik : Tanpa meteran (6)/ >2.200 watt (5)/ 2.200 watt (4)/ 1.300 watt (3)/ 900 watt (2)/ 450 watt (1)		
	Sumber bahan bakar : Listrik (4)/ gas (3)/ minyak tanah (2)/ kayu bakar (1)		
	Hiburan keluarga : TV (5)/ video (4)/ tape (3)/ radio (2)/ HP (1)		
Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	Anggota keluarga yang sering mengalami sakit dalam kurun waktu 1 tahun : ≤ 1 orang (3)/ 2-3 orang (2)/ > 3 orang (1)	10%	- Baik dan mudah (Skor 17-23) (3) - Cukup sehat dan cukup mudah (Skor 12-16) (2) - Kurang sehat dan sulit
	Lokasi puskesmas terdekat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)		
	Lokasi dokter umum terdekat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)		
	Biaya berobat : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)		
	Penanganan berobat : Baik (3)/ cukup (2)/ kurang baik (1)		
	Mendapatkan alat kontrasepsi dan konsultasi KB : Mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)		
	Harga obat-obatan : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)		

Indikator	Kriteria	Bobot	Skor
			(Skor 7-11) (1)
Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan	Lokasi pendidikan SD dan sederajat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah (Skor 13-18) (3) - Cukup (Skor 9-12) (2) - Sulit (Skor 5-8) (1)
	Lokasi pendidikan SMP dan sederajat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)		
	Lokasi pendidikan SMA dan sederajat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)		
	Biaya sekolah : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)		
	Prosedur penerimaan : Mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)		
Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Fasilitas kendaraan umum : Tersedia (3)/ cukup tersedia (2)/ kurang tersedia (1)	4%	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah (Skor 6) (3) - Cukup (Skor 4-5) (2) - Sulit (Skor 2-3) (1)
	Ongkos dan biaya transportasi : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)		
Kehidupan beragama	Tingkat toleransi antar umat dan golongan : Baik (3)/ cukup baik (2)/ kurang baik (1)	4%	<ul style="list-style-type: none"> - Baik (3) - Cukup baik (2) - Kurang baik (1)
Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan	Frekuensi responden dalam mengalami tindak kejahatan : Tidak pernah mengalami (3)/ pernah mengalami (2)/ sering mengalami (1)	4%	<ul style="list-style-type: none"> - Aman (3) - Cukup aman (2) - Kurang aman (1)

Sumber : SUSENAS (2016) dalam BPS Nasional (2017)

Data dari semua indikator dianalisis terlebih dahulu skor nilainya, sehingga semua skor tersebut akan dikalkulasikan secara keseluruhan dari semua responden. Semua aspek pertanyaan dari setiap indikator kesejahteraan memiliki bobot persentase yang telah ditentukan yang dimana bobot tersebut dapat diartikan sebagai besarnya kontribusi dari setiap indikator dalam penentuan tingkat kesejahteraan petani. Bobot terbesar terdapat pada indikator pendapatan yaitu sebanyak 25%, sedangkan bobot terkecil terdapat pada indikator kependudukan, ketenagakerjaan, fasilitas tempat tinggal, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi, rasa aman, dan kehidupan beragama yang masing-masing

memiliki bobot 4%. Tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebelum alih fungsi lahan yaitu sebesar 30,44 dan termasuk ke dalam kategori kesejahteraan tinggi (27 – 33). Skor tertinggi terdapat pada indikator pengeluaran rumah tangga petani yaitu sebanyak 180 dan skor terendah terdapat pada indikator pendapatan rumah tangga petani dengan nilai skor 81 (Tabel 5.).

Setelah alih fungsi lahan, terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan petani menjadi 30,66 dan masih tetap termasuk ke dalam kategori kesejahteraan tinggi. Hal ini dipengaruhi juga oleh peningkatan jumlah skor pada setiap indikator kesejahteraan. Skor

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
FAHRAN AL-FAJAR, TRISNA INSAN NOOR, DEDE SUDRADJAT**

tertinggi masih terdapat pada indikator pengeluaran dengan nilai skor yang masih sama seperti sebelumnya yaitu 180, serta pada skor terendah juga masih terdapat pada indikator pendapatan, namun mengalami penurunan nilai menjadi 79 (Tabel 5.). Peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh adanya beberapa nilai skor yang dihasilkan dari indikator kesejahteraan yang semakin meningkat, seperti pada indikator ketenagakerjaan, fasilitas tempat tinggal, kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan

kesehatan, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari tingkat kesejahteraan petani padi sawah menurut SUSENAS (2016) di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah alih fungsi lahan, maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar petani telah mengalami peningkatan sebanyak 0,22 atau 0,72%. Perubahan tertinggi terdapat pada indikator fasilitas tempat tinggal yang mengalami peningkatan sebanyak tujuh skor atau 6,67%.

Tabel 5. Tingkat Kesejahteraan Petani (SUSENAS, 2016) Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan

No.	Indikator	Total		Bobot Indikator Kesejahteraan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1	Kependudukan	133	133	4
2	Ketenagakerjaan	82	85	4
3	Pendapatan rumah tangga petani	81	79	25
4	Pengeluaran rumah tangga petani	180	180	16
5	Keadaan tempat tinggal	135	135	13
6	Fasilitas tempat tinggal	105	112	4
7	Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	132	133	10
8	Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan	135	135	12
9	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	117	118	4
10	Kehidupan beragama	135	135	4
11	Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan	135	135	4
Total		1370	1380	100
Nilai Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Setelah Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Kersanagara Tahun 2017		= 1.370/45 = 30,44 (Kategori tinggi)	= 1.380/45 = 30,66 (Kategori tinggi)	

Sumber : Data diolah, 2018

Sementara itu, untuk perubahan terkecil terdapat pada indikator kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan indikator kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi dengan jumlah peningkatan masing-masing satu skor. Selain itu, pada indikator pendapatan rumah tangga mengalami penurunan sebanyak dua skor, serta untuk indikator-indikator yang lainnya tidak mengalami perubahan nilai skor setelah alih fungsi lahan (Tabel 6.). Besarnya peningkatan dari fasilitas tempat tinggal petani dikarenakan

terdapat beberapa petani yang telah merenovasi rumah, memperluas area lantai rumah, dan adanya beberapa peningkatan dari segi daya listrik dan sumber bahan bakar rumah tangga setelah alih fungsi lahan.

Hasil analisis di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumaryanto *et al.* (2001) mengenai dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa petani yang telah melakukan alih fungsi lahan sebagian besar mengalami perubahan tingkat kesejahteraan

yang cenderung lebih menurun dari sebelumnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari indikator kesejahteraan petani berdasarkan SUSENAS (2016) yang cukup beragam dari segi kondisi sosial dan

ekonomi rumah tangga, serta adanya persentase bobot pertanyaan dari setiap indikator kesejahteraan.

Tabel 6. Perubahan Tingkat Kesejahteraan Petani (SUSENAS, 2016) Setelah Alih Fungsi Lahan

No.	Indikator	Perubahan	Jumlah Perubahan Skor	Persentase Perubahan (%)
1	Kependudukan	Tidak mengalami perubahan	0	0
2	Ketenagakerjaan	Mengalami peningkatan	3	3,66
3	Pendapatan rumah tangga petani	Mengalami penurunan	2	2,47
4	Pengeluaran rumah tangga petani	Tidak mengalami perubahan	0	0
5	Keadaan tempat tinggal	Tidak mengalami perubahan	0	0
6	Fasilitas tempat tinggal	Mengalami peningkatan	7	6,67
7	Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	Mengalami peningkatan	1	0,76
8	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Tidak mengalami perubahan	0	0
9	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Mengalami peningkatan	1	0,85
10	Kehidupan beragama	Tidak mengalami perubahan	0	0
11	Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan	Tidak mengalami perubahan	0	0
Perubahan Total		Mengalami peningkatan	10	0,72
Perubahan Nilai Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Setelah Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Kersanagara Tahun 2017		Mengalami peningkatan	0,22	0,72

Sumber : Data diolah, 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan 11 indikator kesejahteraan menurut SUSENAS (2016), menyatakan bahwa rumah tangga petani padi sawah di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam kategori kesejahteraan tinggi dan telah mengalami peningkatan nilai sebanyak 0,22 atau 0,72% dari nilai kesejahteraan sebelum alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. 2017

BPS Kota Tasikmalaya dalam Angka 2012-2016.

BPS Nasional. 2017. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013-2015.

Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya. 2017. Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah di Kota Tasikmalaya dengan Kecamatan dan Kelurahan yang Termasuk ke dalam LP2B. Tasikmalaya : Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya..

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT
KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA,
KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
FAHRAN AL-FAJAR, TRISNA INSAN NOOR, DEDE SUDRADJAT**

- Profil Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. 2017.
- Restina, N. 2009. Evaluasi Penggunaan lahan Eksisting dan Arahkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- Soekartawi, A. S., Dillon, J. L., & Hardaker, J. B. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Jakarta : Rafagrafindo Persada.
- Sudjana, N. 2013. Metode statistika. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.